

**PENYUSUNAN REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TELAH
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008
(Studi Kasus Pada PT. Putri Midai Bangkinang)**

SKRIPSI



OLEH

SUMIRAN

NIM : 10973008224

**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2013**

**PENYUSUNAN REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TELAH SESUAI DENGAN
PERATURAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008
(Studi Kasus Pada PT. Putri Midai Bangkinang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau

OLEH

SUMIRAN

NIM : 10973008224



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI**

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

2013

ABSTRAK

PENYUSUNAN REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008

Oleh : SUMIRAN

NIM : 10973008224

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan ketentuan Undang-undang no.36 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak. PT. Putri Midai terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru Tampan terhitung tanggal 24 Januari 2001. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Putri Midai adalah 01.978.310-216.000. Data diambil dari perusahaan meliputi laporan keuangan tahunan dan SPT Tahunan pada tahun 2010. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data perusahaan seperti laporan keuangan laba rugi, neraca, daftar aktiva tetap, dan data-data yang berhubungan dengan perpajakan yaitu SPT (surat pemberitahuan tahunan). Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif yang mana semua data yang telah terkumpul dianalisis dengan menghubungkan antara penerapan akuntansi pajak di perusahaan dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dilihat dari laporan keuangan tahunan dan SPT Tahunan ada beberapa biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan, kesalahan dalam perhitungan laba setelah kena pajak, daftar biaya akumulasi penyusutan kelompok I dan kelompok II, biaya penyusutan bangunan kantor, penyajian hutang pajak di neraca, pembayaran pajak terutang. Terjadinya kesalahan tersebut dapat merugikan perusahaan sendiri. Maka peraturan perpajakan yang berlaku menjadi informasi penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dan perusahaan harus melakukan perhitungan ulang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan tidak akan mengalami kerugian yang dapat merugikan perusahaan sendiri.

Kata Kunci : *Laporan Laba Rugi, Neraca, Daftar Aktiva Tetap, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENYUSUNAN REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008** Studi Kasus Pada PT. Putri Midai Bangkinang. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata I (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.M.Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dony Martias, SE.MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademis dalam Penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hesty Wulandari, SE.M.Sc.Ak selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
7. Pak Fahmil,SE selaku direktur utama PT. Putri Midai, Pak Sugeng selaku direktur, Bu Umi selaku Accaunting yang memberikan dukungan dan kemudahan dalam penelitian ini.
8. Orang tuaku tercinta Ayahanda Sarmin dan Ibunda Sumarni yang selalu mendoakan peneliti dan memberikan dukungan moral maupun moril. Terima kasih untuk semua Pengorbanan, Kesabaran, Nasehat, Do'a, Cinta dan Kasih Sayang yang tiada henti Ayah dan Ibu berikan kepada peneliti sehingga dapat menghantarkan peneliti pada cita-cita yang di inginkan. Tiada balasan

setimpal apa pun yang dapat peneliti berikan kecuali istiqomah tetap selalu berdo'a untuk Ayah dan Ibu semoga selalu berada dalam Naungan Ridho Allah SWT.

9. Seluruh keluarga besar yang telah banyak memberi dukungan moril dan do'a kepada peneliti.
10. Rekan kerja dikantor terutama Cak Wahid dan Pak Zul yang selalu mendukung dan memotifasi penulis.
11. Teman-teman AKN_E Lover's 2009, Zainal Arifin,SE, Arfan, Hendri, Hafiz, Salman, Eko Mujianto,SE, Karno Suntoro,SE, Samiatun,SE, dan yang lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
12. Sahabat dan Teman-teman KKN Air Tiris Kec. Kampar 2009, Salman, Fahri, Zailani, Isro, Tata, Dewi, Kartini, Rini, Ides, dan yang lainnya yang selalu memberikan support dan do'a kepada penulis.
13. Sahabat dan Teman-temanku, Tomi, Ali, Eka yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
14. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Seluruh Temen-temen Kosentrasi Perpajakan 2009 dan yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, saran dan do,a selama penulisan maupun mengikuti perkuliahan.

Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan pernah menjadi sia-sia jika aku dapat bangkit dan memberikan bukti. Akhirnya kepada Allah SWT saya memohon ampun dan memanjatkan doa semoga diberi limpahan rahmat dan

rezekinya, serta memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 9 September 2013
Penulis,

Sumiran

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Laporan keuangan.....	8
2.1.1 definisi Laporan Keuangan	8
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Akuntansi.....	8
2.2 Pajak Penghasilan.....	9
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan.....	9
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	12
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	14
2.2.4 Penghasilan Yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak.....	15
2.2.5 Biaya Yang Dapat Dikurangkan Sebagai Penghasilan Bruto Laporan Keuangan Fiskal.....	19
2.2.6 Ketentuan Perhitungan PPh Untuk Usaha Dibawah 1 Milyar.....	21

3.3 Laporan Keuangan Fiskal.....	23
3.3.1 Aturan Umum Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Laporan Keuangan Fiskal.....	23
3.3.2 Syarat Pembukuan Laporan Keuangan Fiskal.....	24
3.3.3 Biaya Yang Tidak Boleh Dimasukkan Sebagai Pengurang Penghasilan Laporan Keuangan Fiskal.....	26
3.3.4 Biaya Penyusutan Laporan Keuangan Fiskal.....	29
3.3.5 Penyusutan.....	32
3.3.6 Penyusutan Menurut Akuntansi Dengan Metode Garis Lurus.....	32
3.3.7 Penyusutan Menurut Akuntansi Dengan Metode Saldo Menurun.....	34
2.4 Tarif PPh.....	34
2.4.1 Tarif PPh Wajib Pajak Badan dan Usaha Tetap (BUT)....	35
2.5 Pajak Dalam Pandangan Islam.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4 Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	39
4.1 Sejarah Objek Penelitian.....	39
4.2 Aktivitas Objek Penelitian.....	42
4.3 Struktur Organisasi Objek Penelitian.....	44
4.4 Uraian Tugas dan Wewenang.....	45
4.4.1 Komisaris.....	45
4.4.2 Direktur.....	45

4.4.3 Divisi Cater.....	46
4.4.3.1 Kepala Divisi Cater.....	46
4.4.3.2 Karyawan Cater.....	46
4.4.4 Divisi Tusbung.....	47
4.4.4.1 Kepala Divisi Tusbung.....	47
4.4.4.2 Karywan Tusbung.....	47
4.4.5 Divisi Keuangan.....	48
4.4.5.1 Kepala Divisi Keuangan.....	48
4.4.5.2 Karyawan Divisi Keuangan.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
5.1 Laporan Keuangan Sebelum Koreksi.....	49
A. Pendapatan.....	49
B. Beban.....	50
C. Laba.....	51
D. Pajak/PPh.....	51
5.2 Koreksi.....	52
A. Pendapatan.....	52
B. Beban yang tidak boleh dimasukkan sebagai Pengurang Pajak.....	52
C. Koreksi Laba Rugi.....	56
5.3 Perbandingan antara Laporan sebelum dan sesudah Koreksi.....	56
A. Laba sebelum Koreksi.....	56
B. Koreksi.....	57
C. Laba setelah Koreksi.....	57
5.4 Biaya Akumulasi Penyusutan Bukan Bangunan	

Kelompok I dan Kelompok II.....	60
A. Koreksi atas Biaya Akumulasi penyusutan Aktiva Tetap.....	60
5.5 Penyajian Hutang Pajak di Neraca.....	62
5.6 Pajak Terutang.....	64
BAB VI PENUTUP.....	65
6.1 Kesimpulan.....	65
6.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Daftar Tarif Penyusutan Kelompok Harta Berwujud.....	31
Tabel 2.2	Daftar Tarif Penyusutan Kelompok Harta Tak Berwujud.....	33
Tabel 5.1	Koreksi Biaya.....	53
Tabel 5.2	Rangkuman Laporan Koreksi Fiskal Atas Laba Rugi	58
Tabel 5.3	Koreksi atas Biaya Penyusutan Aktiva Tetap.....	60
Tabel 5.4	Neraca.....	61

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.3	Struktur Organisasi PT. Putri Midai.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara. Undang-undang Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, tahun 2000 dengan beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada tahun 2008 digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah. Ditinjau dari pengelompokannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa pemungutan Pajak Penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada Subjek Pajak.

Menurut Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini, menetapkan bahwa setiap wajib pajak badan berkewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Perhitungan pajak dengan cara ini (*self assessment*).

Self assessment ini memberikan konsekuensi perpajakan pada wajib pajak untuk mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Akan tetapi pengetahuan dibidang perpajakan saja tidak cukup jika tidak didukung dengan pembukuan yang baik pula. Untuk mencapai tujuan diatas, maka diperlukan penyusunan

laporan keuangan. Oleh karena itu setiap perusahaan yang menjadi wajib Pajak diwajibkan melakukan pembukuan. Sebuah perusahaan harus mengetahui dengan baik peraturan perpajakan atau tata cara perpajakan yang ditegaskan melalui Pasal 28 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.36 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Perpajakan tersebut, perusahaan harus melakukan pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang, dengan laporan keuangan yang dibuat secara wajar, jelas dan mudah dimengerti maka akan memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal dalam menginterpretasi laporan tersebut.

PT. Putri Midai merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan. Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru Tampan terhitung tanggal 24 Januari 2001. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Putri Midai adalah 01.978.310-216.000. Kewajiban perpajakan sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29. Perusahaan seperti PT. Putri Midai tidak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga kerap kali terjadi kesalahan. Akibat terjadi kesalahan ini antara lain adanya perbedaan dalam menentukan laba fiskal dengan pihak perusahaan. Akibat perbedaan-perbedaan perlakuan akuntansi timbul istilah laba

fiskal (Penghasilan Kena Pajak) dan laba komersial (laba usaha). Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, sedangkan laba komersial adalah laba yang tercantum dalam laporan keuangan yang penyajiannya berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Oleh karena itu, diperlakukan koreksi fiskal terhadap laba yang disajikan dalam menghitung pajak terutang.

Akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang berbeda antara Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan maka dilakukan rekonsiliasi fiskal menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini digolongkan atas perbedaan waktu atau perbedaan sementara adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya tertentu menurut biaya akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Beda waktu juga merupakan perbedaan saat mengakui atau melaporkan penghasilan dan biaya antara laporan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam satuan pajak. Perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi. Akibat perbedaan ini akan timbul selisih antara jumlah pajak penghasilan yang terutang yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Beda tetap disebabkan karena menurut prinsip akuntansi, suatu penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan boleh dilaporkan dalam laporan keuangan komersial sedangkan menurut Prinsip Pajak Penghasilan dan

biaya tersebut tidak pernah diakui sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal.

Permasalahan inilah yang juga dihadapi oleh PT. Putri Midai merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam laporan keuangan untuk perusahaan ini menghitung secara langsung pajak penghasilan yang dari laba rugi sebelum pajak yang disajikan menurut Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum, belum disesuaikan menurut Undang-undang perpajakan, masalahnya :

Didalam laporan keuangan yang disusun oleh PT.Putri Midai terdapat kesalahan dalam menghitung laba setelah kena pajak yaitu :

Perusahaan memasukan beberapa jenis biaya yang menurut undang-undang perpajakan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan dengan perincian sebagai berikut : a) Didalam biaya gaji terdapat biaya pembuatan seragam 5 orang karyawan. b) Biaya carter terdapat biaya olahraga fitnes dan futsal. c) Biaya penyusutan bangunan kantor.

Dengan permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Telah Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Studi kasus pada PT. Putri Midai Bangkinang) ”**

1.2 Perumusan masalah

“ Bagaimana penyusunan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang Sesuai Dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pada PT. Putri Midai ” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

Menyusun Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang Sesuai Dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
- b. Bagi pihak perusahaan, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam menghitung PPh Pasal 25 dan penghitungan pajak yang terutang pada akhir tahun.
- c. Sebagai bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat menerapkan akuntansi pajak dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

1.5 Sistematika penulisan

Dalam pembahasan diatas, penulis membaginya kedalam lima bab dan dalam urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latarbelakang Masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas tentang laporan keuangan, pajak penghasilan, laporan keuangan fiskal, tarif PPh, pajak dalam pandangan islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian, dan lain-lainya.

BAB V**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan dengan cara membandingkan teori yang dibahas pada bab II dengan prakteknya yang dibuat oleh perusahaan.

BAB VI**PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Accounting Principles Board (APB) dan American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS adalah :

Sebagai suatu aktivitas atau kegiatan pelayanan, yang fungsinya terutama untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari suatu entitas ekonomi dengan maksud berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, dalam memilih secara bijak diantara alternatif tindakan. (Hans Kartikahadi, 2012).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang dipergunakan oleh perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai posisi dan kondisi keuangan, kinerja serta hasil-hasil yang telah di capai oleh perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan lain terhadap perusahaan yaitu untuk memberikan informasi keuangan perusahaan yang bersangkutan.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Akuntansi

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, tujuan laporan keuangan adalah :

Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. laporan keuangan yang

juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai entitas. (Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, 2012 : 117-118).

Akuntansi juga merupakan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif yang digunakan dalam kaitannya dengan evaluasi dalam membuat pertimbangan, disamping itu meskipun para akuntan memberi banyak penekanan pada pelaporan tentang apa yang terjadi, namun informasi masa lalu ini dimaksudkan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dimasa yang akan datang.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan/ordonansi seperti yang dikenal dengan Pajak Pendapatan orang pribadi yang dipunggut berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1984 dan pajak perseroan yang diatur dalam Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 serta pajak atas bunga, dividen, dan royalty yang diatur dalam undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti tahun 1970.

Selanjutnya sejak tahun 1984 Pajak Penghasilan dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah perkembangannya, undang-undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, tahun 2000, dan yang terakhir dilakukan perubahan tahun 2008.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada tahun 2008 digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah sebagaimana telah diuraikan di atas. Ditinjau dari pengelompokannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa pemungutan Pajak Penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada Subjek Pajak.

Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berlandaskan dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi, globalisasi, dan reformasi di berbagai bidang, sehingga diperlukan adanya perubahan undang-undang Pajak Penghasilan dalam upaya pemerintah meningkatkan fungsi dan perannya mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Perubahan undang-undang Pajak Penghasilan dimaksudkan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah untuk:

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
- d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; serta
- e. Lebih menunjang kebijakan pemerintahan dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Pokok-pokok perubahan tersebut meliputi:

- a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;
- b. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan. Perubahan dan penyederhanaan struktur tarif ini meliputi penurunan tarif secara bertahap,

terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan

- c. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, system *self assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki terutama pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan netto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas (waluyo:87-88).

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Definisi subjek pajak (secara teoritis) adalah pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh Undang-Undang untuk membayar pajak atau dikenai pajak (wajib pajak) Dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat 1 ada (4) pihak yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. 1).Orang Pribadi

Yang dimaksud orang pribadi dalam Undang-Undang pajak penghasilan adalah manusia yang manusia yang masih hidup. Orang pribadi tidak merujuk pada usia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan atau hal lainnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan orang pribadi itu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah uzur

entah berprofesi sebagai petani, karyawan, pengangguran, tuna wisma, pejabat negara.

- 2). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi menjadi subjek pajak menggantikan yang berhak yaitu calon ahli waris. Oleh karena itu warisan yang belum terbagi disebut subjek pajak pengganti atau subjek pajak substitusi. Penentuan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dimaksudkan agar bila warisan yang belum terbagi yang memberikan penghasilan, penghasilan tersebut tidak bisa lolos dari pengenaan pajak.

- b. Badan

Undang-Undang pajak penghasilan 2008 pada bagian penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan definisi badan yaitu : sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditier, perseroan lainnya, badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

- c. Badan Usaha Tetap

Menurut pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bentuk Usaha Tetap adalah suatu bentuk Usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa :

- 1) Tempat kedudukan manajemen
- 2) Cabang perusahaan
- 3) Kantor perwakilan
- 4) Gedung kantor
- 5) Pabrik
- 6) Bengkel
- 7) Gudang
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber daya alam
- 10) wilayah kerja pertambang minyak dan gas bumi
- 11) Perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan.
- 12) proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan.
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka 12 bulan.

- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau penggung resiko di Indonesia; dan
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
(Siti Sesmi : 81-82)

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a). Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan, dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b). Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c). Laba usaha
- d). Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. keuntungan yang diperoleh perseoran, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambil alihan usaha.
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan

- keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - e). Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f). Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g). Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi.
 - h). Royalti atau imbalan atas penggunaan pajak.
 - i). Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j). Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k). Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - l). Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - m). Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n). Premi asuransi.
 - o). Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - p). Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - q). Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
 - r). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s). Surplus Bank Indonesia. (Siti Resmi :86-91)

2.2.4 Penghasilan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak

Atas penghasilan tertentu, Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan. Pengecualian ini mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas

perpajakan kepada wajib pajak tetapi tetap mengenakan pajak penghasilan tersebut atau demi kemajuan sosial ekonomi masyarakat tertentu.

Berikut ini jenis-jenis penghasilan tersebut yang tidak termasuk sebagai objek pajak Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 (Djoko muljono : 41-49) :

- a. 1. Bantuan sumbangan termasuk zakat diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerimaan zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau yang

menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagai mana dimaksud dalam pasal 15.

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25 persen dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagai maksud pada nomor g, dalam bidang –bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. dihapuskan.
- k. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Jakarta di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.5 Biaya Yang Dapat Dikurangkan Sebagai Penghasilan Bruto Laporan Keuangan Fiskal

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Perpajakan, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, grafikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- d. Kerugian penjualan atau pengalihan harta yang memiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan penelitian.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - 1). Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2). Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan atau Badan Urusan piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian mengenai penghapusan piutang atau pembebasan uang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - 3). Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
 - 4). Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak.
- i. Sumbangan dalam rangka penaggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- k. Biaya pembangunan infrastuktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

2.2.6 Ketentuan Perhitungan PPh untuk usaha dibawah 1 Milyar

Suharno dan Wirawan, (2007) mengatakan besarnya penghasilan netto merupakan salah satu unsur yang dipergunakan untuk penghitungan besarnya penghasilan kena pajak dan besarnya PPh yang terutang.

1. Ketentuan Norma perhitungan

Perhitungan dan PPh yang tidak atau kurang dibayar ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%.

2. Perhitungan Norma Perhitungan

- a. $\text{Perhitungan netto} = \text{tarif norma} \times \text{jumlah penghasilan}$
/penerimaan bruto/kotor 1(satu) tahun.

- b. Tariff norma tersebut berupa persentase tertentu oleh Direktur Jenderal Pajak. Besarnya tarif norma perhitungan netto tersebut berbeda-beda untuk masing-masing jenis usaha dan masing-masing daerah.
- c. Dalam Kepdirjen No.536 /PJ/2000 tanggal 29 desember 2000, jenis usaha dibagi menjadi 183 jenis usaha, dan tiap jenis usaha dibedakan lagi menjadi 3 daerah usaha, yaitu 10 ibu kota propinsi, ibu kota propinsi lainnya, dan daerah lainnya yang diluar ibu kota propinsi, (10 ibu kota propinsi lainnya, dan daerah lainnya diluar ibu kota propinsi 10 ibu kota lainnya antara lain adalah : Medan,Palembang,Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak).
- d. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak dijelaskan penentuan daerah berdasarkan tempat tinggal orang pribadi atau tempat usaha yang dilakukan. Dengan pertimbangan untuk menghitung tarif norma perhitungan untuk menghitung penghasilan netto dan juga disusun berdasarkan jenis usaha, maka penentuan daerah dalam memilih besarnya tarif norma adalah sesuai lokasi atau tempat usaha.

3.3 Laporan Keuangan Fiskal

3.3.1 Aturan Umum Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Laporan Keuangan Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang pajak penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak).

Menurut Kesit (2001), untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan

prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya /pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya /pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi (Siti Resmi:391-397).

3.3.2 Syarat Pembukuan Laporan Keuangan Fiskal

Syarat pembukuan menurut ketentuan perpajakan adalah pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan sehingga cukup untuk menghitung :

1. Penghasilan kena pajak
2. Harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa
3. Perhitungan jumlah pajak terutang

Dan terdapat sekurang-kurangnya 8 (delapan) aspek fundamental yang berkaitan dengan ketentuan penyelenggaraan sistem pembukuan dan/atau pencatatan seperti di atur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut, yang secara garis besar dapat dikemukakan dibawah ini :

1. Pembukuan harus diselenggarakan dengan berlandaskan pada itikad baik, dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf lain,angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang di izinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip atas asas dan berdasarkan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Perubahan metode pembukuan dan /atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak.
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat ditentukan besarnya pajak yang terutang.
6. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing selain rupiah hanya dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan.

7. Wajib pajak yang menurut pasal 28 Undang-Undang KUP No 28 tahun 2007 dikecualikan dari kewajiban atau tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan harus menyelenggarakan yang terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan dan / atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
8. Buku-buku, catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak –orang pribadi, atau tempat kedudukan bagi Wajib Pajak –Badan.

3.3.3 Biaya Yang Tidak Boleh Dimasukkan Sebagai Pengurang Penghasilan Laporan Keuangan Fiskal

Biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurangan penghasilan terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali seperti :
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan

hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara sosial
 3. Cadangan penjaminan untuk lembaga pinjaman simpanan
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan

istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan dengan pekerjaan yang dilakukan

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang pribadi yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang- undangan di bidang perpajakan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan beban melalui penyusutan atau amortisasi (waluyo : 106-107).

3.3.4 Biaya Penyusutan Laporan Keuangan Fiskal

Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harta perolehan aktiva menjadi biaya (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba. Ikatan Akuntansi Indonesia (2004: 17.3) mengemukakan metode penyusutan yang diperbolehkan dalam Undang-undang Perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Metode garis lurus (*straight-line method*)
- 2) Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 harta yang dapat disusutkan adalah harta yang tidak berwujud, yang dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 Tahun.

Didalam pelaksanaannya harta berwujud yang dapat disusutkan dibagi atas dua jenis yaitu harta berwujud bangunan dan jenis harta berwujud bukan bangunan. Untuk lebih jelas, perhitungan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat 6 dalam tabel II, yang terdiri dari daftar penyusutan kelompok harta berwujud (II,1) dan harta tak berwujud (II.2), dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Tabel II.I Daftar Tarif Penyusutan Kelompok Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II Bangunan			
Permanen	20 tahun		5%
Tidak permanen	10 tahun		10%

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 11

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 bahwa penyusutan dimulai pada saat :

- 1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan hartaberwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik dan digunakan untuk mendapatkan, Menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih 1(satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- 2) Penyusutan atas harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku,

dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

- 3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- 4) Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- 5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Sedangkan untuk menghitung amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) atau dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining balance method*) , dengan syarat dilakukan secara konsisten.

Dalam perhitungan amortisasi, masa manfaat dan tarif penyusutan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 11a dalam tabel II.

Tabel II.2 Daftar Tarif Penyusutan Kelompok Harta Tak berwujud

Kelompok Harta tak berwujud	Masa Manfaat	Metode Garis lurus	Metode Saldo Menurun
- Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
- Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
- Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
- Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 11a.1

3.3.5 Penyusutan

Penyusutan (*depreciation*) didefinisikan sebagai proses Akuntansi dalam mengalokasikan Biaya Aktiva Berwujud ke Beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut (Kieso, Donal E, 2002).

3.3.6 Penyusutan Menurut Akuntansi Dengan Metode Garis Lurus

Dengan metode garis lurus, beban penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya sama. Dengan demikian jumlah penyusutan tiap tahun dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan} = (\text{HP} - \text{NR})/n$$

Keterangan

HP = Harga Perolehan Aktiva Tetap

NR = Nilai Residu atau Nilai Sisa

UE = Taksiran Umur Ekonomis Aktiva Tetap

Contoh:

Pada tanggal 5 April 2000 dibeli sebuah mesin dengan harga perolehan Rp 13.000.000,00. Usia kegunaan mesin tersebut ditaksir selama 8 tahun dan nilai

residu Rp 1.000.000,00. Penyusutan tiap tahun penggunaan mesin dari data di atas, dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Rp13.000.000,00} - \text{Rp1.000.000,00}}{8} = \text{Rp1.500.000,00}$$

Beban penyusutan mesin tahun 2000 adalah sebesar :

$$\text{Penyusutan} = 9/12 \times \text{Rp 1.500.000,00} = \text{Rp 1.125.000,00.}$$

Mengapa 9/12 Karena dari 12 bulan yang ada pada tahun 2000, mesin hanya beroperasi selama 9 bulan, yakni mulai bulan April hingga bulan Desember. Jumlah inilah yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2000 dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Des 31	Beban Penyusutan Mesin	Rp 1.125.000,00
	Akumulasi penyusutan Mesin	Rp 1.125.000,00

Beban penyusutan mesin untuk setiap periode penggunaannya adalah sebagai berikut:

No	Thn	Perhitungan beban penyusutan thn berjalan	Beban Penyusutan thn berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aktiva
1.	2000	9/12 x Rp1.500.000,00	Rp1.125.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp11.875.000,00
2.	2001	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp 2.625.000,00	Rp10.375.000,00
3.	2002	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp 4.125.000,00	Rp 8.875.000,00
4.	2003	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp 5.625.000,00	Rp 7.375.000,00
5.	2004	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp 7.125.000,00	Rp 5.875.000,00
6.	2005	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp 8.625.000,00	Rp 4.375.000,00
7.	2006	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp10.125.000,00	Rp 2.875.000,00
8.	2007	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp11.625.000,00	Rp 1.375.000,00
9.	2008	3/12 x Rp1.500.000,00	Rp 375.000,00	Rp12.000.000,00	Rp 1.000.000,00

Akumulasi penyusutan mesin setelah habis umur penggunaannya adalah Rp12.000.000,00

3.3.7 Penyusutan Menurut Akuntansi Dengan Metode Saldo Menurun

Dengan metode ini penyusutan setiap tahun penggunaan Aktiva Tetap, ditetapkan atas dasar persentase tertentu dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Prosentase penyusutan ditetapkan sebesar dua kali prosentase penyusutan menurut metode garis lurus.

Contoh:

Sebuah mesin dibeli tanggal 1 Oktober 2000 dengan harga perolehan Rp10.000.000,00. Taksiran umur ekonomis selama 5 tahun.

Penyusutan setiap tahun dihitung sebagai berikut:

Menghitung besarnya prosentase penyusutan: $100\% : 5 = 20\%$. Dengan demikian

besarnya prosentase menurut metode menurun ganda adalah $2 \times 20\% = 40\%$

Periode Akuntansi	Perhitungan Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember	Harga buku Mesin Per 31 Desember
2000	$3/12 \times 40\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$	Rp 1.000.000,00	Rp 9.000.000,00
2001	$40\% \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp} 3.600.000,00$	Rp 4.600.000,00	Rp 5.400.000,00
2002	$40\% \times \text{Rp}5.400.000,00 = \text{Rp} 2.160.000,00$	Rp 6.760.000,00	Rp 3.240.000,00
2003	$40\% \times \text{Rp}3.240.000,00 = \text{Rp} 1.296.000,00$	Rp 8.056.000,00	Rp 1.944.000,00
2004	$40\% \times \text{Rp}1.944.000,00 = \text{Rp} 777.600,00$	Rp 8.833.600,00	Rp 1.166.400,00
2005	$9/12 \times 40\% \times \text{Rp}1.166.400,00 = \text{Rp}349.920,00$	Rp 9.183.520,00	Rp 816.480,00

4.4 Tarif PPh

Perhitungan PPh yang terutang menurut Undang-undang NO. 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan dianut 2 sistem, yaitu :

- Tarif sepadan/ *flat rate* untuk jenis penghasilan yang diterima Wajib Pajak tertentu. Pemajakan ini bersifat final artinya jumlah penghasilan tersebut

tidak dihitung lagi dalam SPT Tahunan dan PPh atas penghasilan tersebut bukan sebagai kredit pajak, namun jumlah penghasilan dan PPhnya hanya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

- Tarif progresif untuk jenis penghasilan lainnya diluar penghasilan tertentu dan Wajib pajak tertentu. PPh yang terutang dihitung dengan tarif umum pasal 17 UU Pajak dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

4.4.1 Tarif PPh Wajib Pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tarif PPh Badan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

4.5 Pajak Dalam Pandangan Islam

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Perpajakan yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Alasan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat antara lain solidaritas sosial dan tolong menolong antar sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Daruguthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah SAW bersabda : ”Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain diluar zakat”

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Thaubah ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الْعَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرُومِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَجْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Atas dasar alasan di atas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslim di Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak sekaligus.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan waktu Penelitian

PT. Putri Midai berdiri pada tanggal 06 April 2001 yang beralamatkan di JL. DI PENJAITAN No 4f Bangkinang Kabupaten Kampar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data pembukuan dan catatan akuntansi seperti : laporan laba/rugi, neraca, daftar aktiva tetap, dan data-data yang berhubungan dengan perpajakan yaitu SPT Tahunan 2010 yang penulis dapatkan dari bagian accounting.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu : dengan mengumpulkan data-data perusahaan seperti laporan keuangan (neraca dan laba/rugi), daftar aktiva tetap, dan data-data yang berhubungan dengan perpajakan yaitu SPT (surat pemberitahuan tahunan) Pajak Penghasilan PT. Putri Midai Bangkinang.

3.4 Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif yang mana semua data yang telah terkumpul dianalisis dengan menghubungkan antara penerapan akuntansi pajak di perusahaan dengan ketentuan umum perpajakan

yang berlaku, yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Putri Midai merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan yang bekerjasama dengan PT. PLN (persero) yang bertindak sebagai perusahaan pembangkit listrik nasional.

PT. Putri Midai berdiri pada tanggal 06 April 2001 yang beralamatkan di JL. DI PENJAITAN No 4f Bangkinang Kabupaten Kampar. Perusahaan ini ditetapkan berdasarkan keputusan :

1. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI tanggal 26 April 1999. Nomor: C – 1016. HT. 03. 01. Th 1999
2. Berdasarkan SK Kepala BPN Tanggal 18 Oktober 2000 No: 33 – XI – 2000 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah
3. Berdasarkan Keputusan Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia RI No: C – 1146 HT. 01. Th 2001 tentang pengesahan Akta pendirian Perseroan terbatas (PT).
4. Berdasarkan keputusan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Pemerintah kabupaten Kampar yang ditetapkan oleh PERDA No. 24 Tahun 2000, tentang perizinan dan retribusi bidang usaha industry dan perdagangan.

5. Secretariat daerah pemerintah Kabupaten Kampar, berdasarkan keputusan Bupati Kampar No. 180/HK/Tentang izin operasional/izin peruntukan bidang usaha.

Perusahaan ini telah mengemban tugas dalam memberikan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat. Kiprah dari PT. Putri Midai yang dipercaya sebagai salah satu perusahaan mitra dari PT. PLN (Persero) dalam memberikan jasa pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat dapat dilihat dengan tetap digandengnya hingga sekarang.

Dengan pengalaman dalam bidang ketenagalistrikan. PT. Putri Midai telah mempersiapkan tenaga-tenaga yang profesional dan ahli dalam bidang elektrik dan manajemen sebagai pendukung operasional perusahaan. Dengan satu visi dan keyakinan untuk mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dalam setiap kegiatan perusahaan, baik untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan perkembangan dari perusahaan tersebut.

PT. Putri Midai mempunyai tujuan yang bukan hanya untuk kemajuan perusahaan saja tetapi juga ikut serta mendukung dalam pembangunan ekonomi nasional dan terlibat langsung dalam mengisi pembangunan nasional khususnya dalam bidang jasa ketenagalistrikan.

Adapun tujuan perusahaan dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional tercermin dalam filosofi perusahaan antara lain:

1. Kepuasan para pelanggan yang menggunakan jasa tenaga listrik, karyawan, manajemen, mitra usaha, pemerintah dan masyarakat yang menjadi prioritas utama.
2. Landasan operasional haruslah berdasarkan pada menghormati, keterbukaan dan manajemen yang bersih dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perusahaan tersebut.
3. Perusahaan jasa ketenagalistrikan yang menjadi mitra bisnis yang dipercaya, dengan dikelola secara professional dan ahli di bidangnya serta berpengalaman dibidang kelistrikan.
4. Karyawan adalah kunci sukses pada seluruh komponen usaha, sehingga segala keuntungan dan kerugian dari perusahaan dapat ditanggung bersama.

Setiap perusahaan memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk menghadapi dunia bisnis yang semakin ketat pada zaman sekarang ini. Adapun visi PT. Putri Midai adalah *“sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ketenagalistrikan nasional yang mengutamakan profesionalisme dan kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa tenaga listrik, serta mampu ikut bersaing dalam berbagai jenis kegiatan yang berguna bagi perusahaan serta bagi pegawai yang ikut menjalankan perusahaan tersebut”*.

Sedangkan misi yang ingin diwujudkan oleh PT. Putri Midai adalah:

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dapat menjalankan kegiatan perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan.
2. Menjadi mitra bisnis yang tepat, baik dalam hal memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan ikut serta andil dalam memajukan perekonomian nasional.
3. Untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa kelistrikan di Riau khususnya dikabupaten Kampar dalam memberikan pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan tenaga listrik.

4.2 Aktifitas Kerja Pada PT. Putri Midai

PT. Putri Midai mempunyai beberapa aktifitas utama dalam perusahaan, diantaranya:

1. Pelayanan pembayaran rekening listrik

Perusahaan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam transaksi pembayaran rekening listrik sejumlah yang digunakan oleh pelanggan. dalam memudahkan transaksi disetiap daerah maka perusahaan membuka unit-unit pembayaran rekening listrik disetiap kelurahan yang berada dikabupaten Kampar.

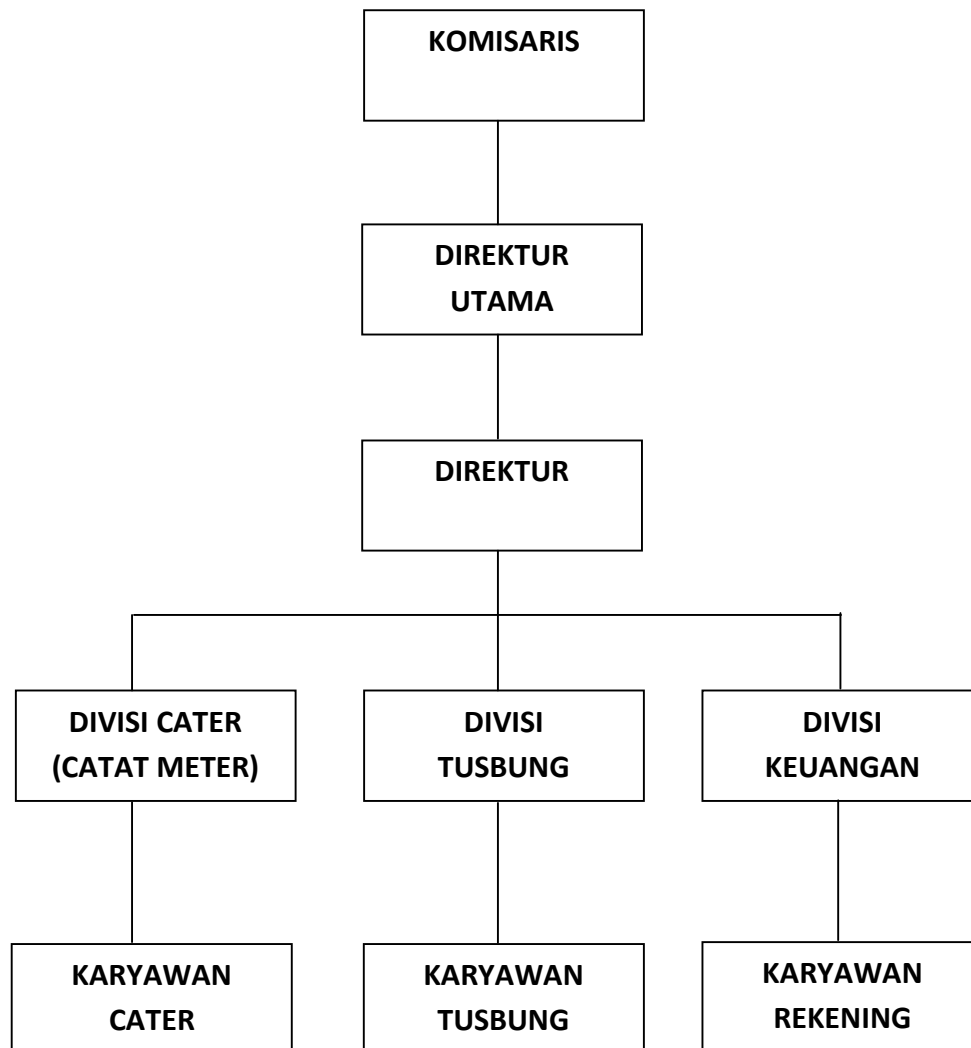
2. Proses Catat Meter (CATER)

Kegiatan ini mencakup aktifitas petugas cater dalam melakukan pencatatan atau pembacaan stant meter yang digunakan pelanggan untuk mengetahui jumlah pemakaian tenaga listrik tiap bulannya. Kegiatan ini dilakukan setiap akhir bulan.

3. Proses Pemutusan dan Penyambungan (TUSBUNG)

Bagi pelanggan yang menggunakan jasa ketenagalistrikan berkewajiban melakukan pembayaran setiap bulannya, bagi pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya maka akan diberikan sanksi mulai dari surat peringatan hingga melakukan pemutusan. Selain itu perusahaan juga punya wewenang untuk melakukan penyambungan listrik bagi pelanggan yang menginginkan pemakaian tenaga kelistrikan.

4.3 Struktur Organisasi PT. Putri Midai



Dengan adanya stuktur organisasi tersebut kita dapat melihat dan menganalisis tentang tugas dan wewenang seluruh komponen atau unsur yang ada di dalam tubuh perusahaan PT. Putri Midai. Hal ini dapat sama-sama kita lihat peranan masing-masing unsur, dimana masing-masing unsur saling berkaitan dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan perusahaan.

4.4 Uraian Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang setiap staf pada PT. Putri Midai adalah sebagai berikut :

4.4.1 Komisaris

a. Tugas

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil oleh Direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan arahan-arahan kepada Direksi.
2. Melakukan Pemeriksaan semua laporan pembukuan aktivitas dan keuangan perusahaan.
3. Berkewajiban dalam mengetahui semua tindakan yang dijalankan oleh Direksi.

b. Wewenang

1. Bertanggung jawab tentang kinerja yang semua karyawan perusahaan.
2. Berhak memberhentikan anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan kebijakan perusahaan.

4.4.2 Direktorat

a. Tugas

1. Mengkoordinir kinerja semua karyawan.
2. Memberikan solusi kepada semua Divisi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

3. Memberikan arahan yang dalam hal ini pelaksanaan kegiatan kerja apabila terjadi hambatan atau permasalahan dalam pekerjaan.
- b. Wewenang
1. Bertanggung jawab penuh dalam mencapai maksud dan tujuan.
 2. Melakukan penilaian terhadap kinerja semua Divisi.

4.4.3 Divisi Cater

4.4.3.1 Kepala Divisi Cater (Catat Meter)

- a. Tugas
1. Mengkoordinir sub bidang kerja cater (catat meter) yang telah ditetapkan.
 2. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan catat meter yang dilakukan karyawan cater.
 3. Memberikan pelaporan setiap kegiatan-kegiatan cater (catat meter) setiap bulannya kepada direksi.
- b. Wewenang
1. Berhak melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan cater.
 2. Berhak memberikan surat perintah kerja atau teguran kepada karyawan cater.
 3. Melakukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing karyawan cater.

4.4.3.2 Karyawan Cater (Catat Meter)

- a. Tugas

1. Melakukan pencatatan meteran pemakaian listrik oleh masyarakat setiap bulannya
2. Membuat laporan hasil cater kepada kepala divisi

4.4.4 Divisi TUSBUNG (Putus Sambung)

4.4.4.1 Kepala Divisi Tusbung (Putus Sambung)

a. Tugas

1. Mengkoordinir sub bidang kerja cater (Putus Sambung) yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan Tusbung yang dilakukan karyawan cater.
3. Memberikan pelaporan setiap kegiatan-kegiatan Tusbung (putus sambung) setiap bulannya kepada direksi.

b. Wewenang

1. Berhak melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan tusbung.
2. Berhak memberikan surat perintah kerja atau teguran kepada karyawan Tusbung.
3. Melakukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing karyawan tusbung.

4.4.4.2 Karyawan TUSBUNG (Pemutusan dan Penyambungan)

a. Tugas

1. Melakukan pemutusan dan penyambungan aliran listrik masyarakat setiap bulannya

2. Membuat laporan hasil keputusan maupun penyambungan listrik masyarakat kepada kepala divisi TUSBUNG

4.5 Divisi Keuangan

4.5.1 Kepala Divisi Keuangan

a. Tugas

1. Mengkoordinir sub bidang kerja bagian keuangan
2. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan karyawan rekening.
3. Membuat rekap laporan keuangan

b. Wewenang

1. Berhak melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan rekening.
2. Berhak memberikan surat perintah kerja atau teguran kepada karyawan rekening.
3. Melakukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing karyawan rekening.

4.5.2 Karyawan Divisi Keuangan

Tugas

1. Menerima pembayaran rekening listrik masyarakat
1. Melakukan pencatatan laporan keuangan dari transaksi pembayaran rekening listrik masyarakat
2. Memberikan hasil laporan keuangan kepada kepala Divisi Keuangan.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Laporan Keuangan Sebelum Koreksi

A. Pendapatan

Adapun komponen serta jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh PT. Putri Midai selama 2010 adalah sebagai berikut :

PT. Putri Midai
Rincian Laporan Laba Rugi
Periode yang berakhir 31 Desember 2010

Pendapatan Cater	Rp. 735.948.080,00
Pendapatan Outsourcing	Rp. 350.622.600,00
Pendapatan Perbaikan Trafo	Rp. 67.522.806,00
Pendapatan Payment Point	Rp. 95.408.000,00
Pendapatan Tusbung	<u>Rp. 191.361.000,00</u>
PendapatanBruto	Rp.1.325.453.137,00

Pendapatan bruto perusahaan sebesar Rp. 1.325.453.137,00 sudah termasuk dipotong biaya PPN 10% .

B. Beban

Beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Biaya usaha tersebut terdiri dari :

PT. Putri Midai

Rincian Beban-Beban

Periode yang berakhir 31 Desember 2010

Beban	
Biaya Gaji	Rp.903.179.324,00
Biaya Carter	Rp. 24.973.997,00
Biaya Outsourcing	Rp. 3.079.200,00
Biaya Payment Point	Rp. 6.931.000,00
Biaya Tusbung	Rp. 21.899.000,00
Biaya ATK	Rp. 11.827.550,00
Biaya Komunikasi	Rp. 5.864.738,00
Biaya Listrik	Rp. 4.551.695,00
Biaya Transport	Rp. 13.010.455,00
Biaya Jamsostek	Rp. 73.274.366,00
Biaya Penyusutan	<u>Rp. 18.848.150,00</u>
Jumlah Biaya	Rp.1.087.439.475,00

Sumber data : PT. Putri Midai

Beban-beban ini telah disajikan dalam laporan keuangan laba rugi perusahaan dan dapat dilihat dilampiran yang penulis lampirkan pada skripsi ini

C. Laba

Adapun ringkasan laporan laba rugi perusahaan dengan perhitungan sebagai berikut :

PT. Putri Midai
Rincian Laporan Laba Rugi
Periode yang berakhir 31 Desember 2010

Pendapatan	<u>Rp. 1.440.862.486,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.440.862.486,00
❖ PPN 10%	<u>(Rp. 115.409.349,00)</u>
Laba Kotor	Rp.1.325.453.137,00
Biaya usaha	<u>(Rp.1.087.439.475,00)</u>
Laba bersih	Rp. 238.013.662,00

Berdasarkan perhitungan diatas maka laba bersih menurut perusahaan sebelum kena pajak adalah sebesar Rp. 238.013.662,00.

- ❖ PPN 10% merupakan pemotongan pajak pertambahan nilai dari pengadaan alat-alat yang dibeli oleh PT. Putri Midai yang dipungut pihak PT. PLN (Persero) Cab. Pekanbaru selaku penyuplai atau penyedia .

D. Pajak /PPh

Untuk perhitungan pajak penghasilan perusahaan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-39/2009 dengan metode tarif PPh Pasal 31 E sebagai berikut :

PPh terutang = 50% X 28% X Seluruh Penghasilan Kena Pajak

50% X 28% X 238.013.662,00 = 29.751.708,00

5.2 Koreksi

A. Pendapatan

Tidak ada koreksi Pendapatan karena pendapatan didapat dari kegiatan usaha perusahaan yang bergerak pada kegiatan jasa.

B. Beban yang tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang pajak

Didalam melakukan perhitungan perusahaan memasukkan beberapa jenis biaya-biaya yang menurut Undang-undang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat 3 tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dengan perincian sebagai berikut :

1) Biaya gaji

Didalam biaya gaji terdapat biaya pembuatan seragam 5 orang karyawan sebesar Rp 1.375.000.

2) Biaya cater

Biaya carter terdapat biaya olahraga fitnes sebesar Rp 1.740.000 dan futsal sebesar Rp 6.720.000

3) Biaya penyusutan

- Biaya penyusutan sebesar Rp 18.848.150,00 yang disajikan perusahaan seharusnya adalah sebesar Rp 19.853.619,00.
- Terdapat selisih sebesar Rp 1.005.469,00 yang didapat dari perhitungan biaya penyusutan bangunan kantor biaya penyusutan yang menggunakan metode saldo menurun dengan hasil Rp 4.794.531,00.

- Sesuai menurut Undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang tarif penyusutan kelompok harta berwujud dalam pasal 11 ayat 6, jumlah penyusutan adalah sebesar Rp 6.250.000,00.
- Selain itu dari daftar aktiva tetap (terlampir) dapat dilihat bahwa aktiva bangunan diperoleh pada tahun 2005 dengan harga perolehan Rp. 125.000.000,00 dan biaya penyusutan yang dibebankan oleh perusahaan sebesar Rp. 4.794.531,00. Sesuai dengan Peraturan Perpajakan, biaya penyusutan bangunan permanen adalah 5 % dari harga perolehan.
- Oleh karena itu koreksi negatif biaya penyusutan yang harus dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

5% x Rp. 125.000.000,00	Rp. 6.250.000,00
Biaya penyusutan menurut perusahaan	(Rp. 4.794.531,00)
Selisih biaya penyusutan	<u>Rp. 1.005.469,00</u>

Akibat dari kesalahan perhitungan biaya penyusutan bangunan membawa pengaruh pada penghasilan kena pajak dan akhirnya mempengaruhi hutang pajak pada akhir tahun. Pengaruh koreksi biaya disajikan pada tabel V.I dibawah berikut ini :

TABEL V.I
PT. Putri Midai
Koreksi Biaya
Periode 31Desember 2010)

N O	JENIS AKTIVA TETAP	U NI T	HARGA PEROLEHAN	TAHU N PERO LEHA N	MASA MANF AAT	% PENY USUT AN	NILAI SISA BUKU	BIAYA PENY.	AKM. PENY.	NILAI SISA BUKU	BIAYA PENY. PERBULA N
	BUKAN BANGUNAN KELOMPOK I										
1	Meja computer (kayu)	1	80.000	2005	4 TH	50	2.500	-	78.750	1.250	-
2	Meja kasir	1	1.500.000	2005	4 TH	50	46.875	-	1.476.563	23.438	-
3	Meja kerja	1	1.500.000	2006	4 TH	50	187.500	-	1.453.125	46.875	-
4	Sepeda motor legenda	1	17.206.000	2006	4 TH	50	607.000	-	16.937.156	268.844	-
5	Sepeda motor RX –King	1	24.560.500	2005	4TH	50	767.516	-	24.176.742	383.758	-
6	Sepeda motor Fit2	1	16.672.000	2006	4TH	50	2.084.000	-	16.151.000	521.000	-
7	Sepeda motor Mio	1	14.499.200	2005	4TH	50	453.100	-	14.272.650	226.550	-
8	Meja Komputer (kayu)	6	3.600.000	2008	4TH	50	900.000	450.000	3.150.000	450.000	37.500
	JUMLAH	13	79.617.700				4.979.178	450.000	77.695.986	1.921.714	37.500

	KELOMPOK II											
1	AC	2	5.000.000	2005	8TH	25	1.186.523	296.631	4.110.107	889.893	24.719	
2	AC	2	5.426.000	2006	8TH	25	2.289.094	572.273	3.709.180	1.716.820	47.689	
3	Kipas	2	150.000	2005	8TH	25	35.596	8.899	123.303	26.697	742	
4	Meja 1/2 biro	6	900.000	2005	8TH	25	213.574	53.393	739.820	160.180	4.449	
5	Meja Komputer (kaca)	4	1.600.000	2005	8TH	25	379.688	94.922	1.315.234	284.766	7.910	
6	Pintu Kaca	1	6.900.000	2006	8TH	25	2.910.938	727.734	4.716.797	2.183.203	60.645	
7	Komputer P4	6	25.800.000	2005	8TH	25	6.122.461	1.530.615	21.208.154	4.591.846	127.551	
8	Komputer p3	1	2.800.000	2005	8TH	25	664.453	166.113	2.301.660	498.340	13.843	
9	Printer 2180	4	21.800.000	2005	8TH	25	5.173.242	1.293.311	17.920.068	3.879.932	107.776	
10	Laptop	1	5.500.000	2006	8TH	25	2.320.313	580.078	3.759.766	1.740.234	48.340	
11	Laptop	1	4.600.000	2006	8TH	25	1.940.625	485.156	3.144.531	1.455.469	70.752	
12	Komputer	2	8.050.000	2006	8TH	25	3.396.094	849.023	5.502.930	2.547.070	125.391	
13	Komputer	2	10.700.000	2008	8TH	25	6.018.750	1.504.688	6.185.938	4.514.063	306.914	
14	Camera digital	27	26.190.000	2008	8TH	25	14.731.875	3.682.969	15.141.094	11.048.906	23.438	
15	Mesin hitung Uang	1	2.000.000	2008	8TH	25	1.125.000	281.250	1.156.250	843.750	11.719	
16	Kipas duduk	1	1.000.000	2008	20	8TH	25	562.500	140.625	578.1`25	421.875	82.031
17	Genset 5000W	1	7.000.000	08	8TH	25	3.937.500	984.375	4.046.875	2.953.125	82.031	
18	Genset 3000W	1	2.500.000	2008	8TH	25	1.406.250	351.563	1.445.313	1.054.688	29.297	
	Jumlah		137.916.000				54.414.474	13.603.619	97.105.144	40.810.856	1.133.635	
1	BANGUNAN Bangunan Kantor	1	125.000.000		20 TH	5	95.890.625	4.794.531	28.857.013	96.142.969	399.544	
	Jumlah		125.000.000	2005			95.890.625	6.250.000	28.857.013	95.890.625	399.544	
	TOTAL		342.533.700				155.284.277	19.853.619	203.658.162	138.623.195	1.570.679	

C. Koreksi Laba Rugi

Berdasarkan koreksi atas pendapatan dan biaya, maka laba rugi setelah koreksi adalah sebagai berikut :

PT. Putri Midai

Rincian Laporan Laba Rugi

Periode yang berakhir 31 Desember 2010

Pendapatan	<u>Rp. 1.440.862.486,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.440.862.486,00
PPN 10%	<u>(Rp. 115.409.349,00)</u>
Laba Kotor	Rp.1.325.453.137,00
Biaya usaha	<u>(Rp.1.078.609.994,00)</u>
Laba bersih	Rp. 246.843.143,00

5.3 Perbandingan antara Laporan sebelum dan sesudah Koreksi

A. Laba sebelum Koreksi

PT. Putri Midai

Rincian Laporan Laba Rugi

Periode yang berakhir 31 Desember 2010

Pendapatan	<u>Rp. 1.440.862.486,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.440.862.486,00
PPN 10%	<u>(Rp. 115.409.349,00)</u>
Laba Kotor	Rp.1.325.453.137,00
Biaya usaha	<u>(Rp.1.087.439.475,00)</u>
Laba bersih	Rp. 238.013.662,00

Perhitungan pajak penghasilan	
50% X 28% X 238.013.662,00	Rp. 29.751.708,00
Laba bersih setelah kena pajak	Rp. 208.261.954,00

B. Koreksi

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas PT. Putri Midai harus melakukan koreksi terhadap hutang pajak sebagai berikut :

Laba (rugi) sebelum koreksi	Rp. 238.013.662,00
Koreksi fiskal positif:	
Biaya lain-lain	<u>Rp. 9.835.000,00</u>
	Rp. 247.848.662,00
Koreksi fiskal negatif:	
Biaya penyusutan bangunan	<u>(Rp. 1.005.469,00)</u>
laba bersih	Rp. 246.843.193,00

C. Laba setelah Koreksi

Laba (rugi) sebelum koreksi	Rp. 238.013.662,00
Koreksi fiskal positif:	
Biaya lain-lain	<u>Rp. 9.835.000,00</u>
	Rp. 247.848.662,00
Koreksi fiskal negatif:	
Biaya penyusutan bangunan	<u>(Rp. 1.005.469,00)</u>
Laba kena pajak	Rp. 246.843.193,00
Perhitungan pajak penghasilan	
25% x Rp. 246.843.193,00	<u>(Rp. 61.710.798,00)</u>
Laba bersih setelah kena pajak	Rp. 185.132.397,00

Berdasarkan hasil dari laporan koreksi fiskal, maka terjadi peningkatan laba sebelum pajak dari Rp. 238.013.662,00` (laporan komersial) menjadi Rp. 246.843.193,00 setelah melakukan koreksi fiskal. Maka jumlah hutang pajak naik dari Rp. 29.751.708,00 menjadi Rp. 61.710.798,00. Pengaruh koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi disajikan pada tabel V.II berikut ini :

TABEL V.II**Rangkuman Laporan Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi (Periode 31Desember 2010)**

Keterangan	Lap.	Koreksi fiskal	Koreksi fiskal	Lap.
	Komersial	Negatif	Positif	Fiskal
Pendapatan				
Carter	Rp. 735.948.080,00			Rp. 735.948.080,00
Outsourcing	Rp.350.622.600,00			Rp. 350.622.600,00
Perbaikan Trafo	Rp. 67.522.806,00			Rp. 67522.806,00.
PPN 10%	<u>(Rp. 115.409.349,00)</u>			<u>(Rp. 115.409.349,00)</u>
	Rp.1.038.684.137,00			Rp.1.038.684.137,00
Payment Point	Rp. 95.408.000,00			Rp. 95.408.000,00
Tusbung	Rp. 191.361.000,00			Rp. 191.361.000,00
Pendapatan bruto	Rp.1.325.453.137,00			Rp.1.325.453.137,00
Biaya-biaya				
Biaya Gaji	Rp. 903.179.324,00		Rp. 1.375.000	Rp. 901.804.324,00
Biaya Cater	Rp. 24.973.997,00		Rp. 8.460.000	Rp. 16.513.997,00
Biaya Outsourcing	Rp. 3.079.200,00			Rp. 3.079.200,00
Biaya Payment Point	Rp. 6.931.000,00			Rp. 6.931.000,00
Biaya Tusbung	Rp. 21.899.000,00			Rp. 21.899.000,00
Biaya ATK	Rp. 11.827.550,00			Rp. 11.827.550,00
Biaya Komukasi	Rp. 5.864.738,00			Rp. 5.864.738,00
Biaya Listrik	Rp. 4.551.695,00			Rp. 4.551.695,00
Biaya Transport	Rp. 13.010.455,00			Rp. 13.010.455,00
Biaya Jamsostek	Rp. 73.274.366,00			Rp. 73.274.366,00

Biaya Penyusutan	Rp. 18.848.150,00	Rp.1.005.469,00		Rp. 19.853.619,00
Jumlah Biaya	(Rp.1.087.439.475,00)			(Rp.1.078.609.994,00)
Laba sebelum kena pajak	Rp. 238.013.662,00			Rp. 246.843.193,00
Pajak PPh	(Rp. 29.751.708,00)			(Rp. 61.710.798,00)
Laba setelah kena pajak	Rp. 208.261.954,00	Rp.1.005.469,00	Rp.9.835.000	Rp. 185.132.397,00

Sumber: Data Olahan

5.4 Biaya Akumulasi Penyusutan Bukan Bangunan Kelompok I dan Kelompok II

A. Koreksi atas Biaya Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap

Koreksi Perhitungan dilakukan dengan metode saldo menurun sesuai Undang-undang perpajakan yang berlaku dapat dilihat pada tabel V.III dibawah ini.

Tabel V.III
PT. Putri Midai
Koreksi atas Biaya Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
Periode 31Desember 2010)

NO	JENIS AKTIVA TETAP	UN IT	HARGA PEROLEHAN	TAH UN PER OLE HAN	MASA MANF AAT	% PENYU SUTAN	NILAI SISA BUKU	BIAYA PENY.	AKM. PENY.	NILAI SISA BUKU	BIAYA PENY. PERBULAN
	BUKAN BANGUNAN KELOMPOK I										
1	Meja computer (kayu)	1	80.000	2005	4 TH	50	2.500	-	40.000	1.250	-
2	Meja kasir	1	1.500.000	2005	4 TH	50	46.875	-	750.00	23.438	-
3	Meja kerja	1	1.500.000	2006	4 TH	50	187.500	-	750.000	46.875	-
4	Sepeda motor legenda	1	17.206.000	2006	4 TH	50	607.000	-	8.603.000	268.844	-
5	Sepeda motor RX –King	1	24.560.500	2005	4TH	50	767.516	-	12.280.250	383.758	-
6	Sepeda motor Fit2	1	16.672.000	2006	4TH	50	2.084.000	-	8.336.000	521.000	-
7	Sepeda motor Mio	1	14.499.200	2005	4TH	50	453.100	-	7.249.600	226.550	-
8	Meja Komputer (kayu)	6	3.600.000	2008	4TH	50	900.000	450.000	1.800.000	450.000	75.000
	JUMLAH	13	79.617.700				4.979.178	450.000	39.808.850	1.921.714	75.000

	KELOMPOK II										
1	AC	2	5.000.000	2005	8TH	25	1.186.523	296.631	1.250.000	889.893	24.719
2	AC	2	5.426.000	2006	8TH	25	2.289.094	572.273	1.356.500	1.716.820	47.689
3	Kipas	2	150.000	2005	8TH	25	35.596	8.899	37.500	26.697	742
4	Meja 1/2 biro	6	900.000	2005	8TH	25	213.574	53.393	225.000	160.180	4.449
5	Meja Komputer (kaca)	4	1.600.000	2005	8TH	25	379.688	94.922	400.000	284.766	7.910
6	Pintu Kaca	1	6.900.000	2006	8TH	25	2.910.938	727.734	1.725.000	2.183.203	60.645
7	Komputer P4	6	25.800.000	2005	8TH	25	6.122.461	1.530.615	6.450.000	4.591.846	127.551
8	Komputer p3	1	2.800.000	2005	8TH	25	664.453	166.113	700.000	498.340	13.843
9	Printer 2180	4	21.800.000	2005	8TH	25	5.173.242	1.293.311	5.450.000	3.879.932	107.776
10	Laptop	1	5.500.000	2006	8TH	25	2.320.313	580.078	1.375.000	1.740.234	48.340
11	Laptop	1	4.600.000	2006	8TH	25	1.940.625	485.156	1.150.000	1.455.469	70.752
12	Komputer	2	8.050.000	2006	8TH	25	3.396.094	849.023	2.012.500	2.547.070	125.391
13	Komputer	2	10.700.000	2008	8TH	25	6.018.750	1.504.688	2.675.000	4.514.063	306.914
14	Camera digital	27	26.190.000	2008	8TH	25	14.731.875	3.682.969	6.547.500	11.048.906	23.438
15	Mesin hitung Uang	1	2.000.000	2008	8TH	25	1.125.000	281.250	500.000	843.750	11.719
16	Kipas duduk	1	1.000.000	20082	8TH	25	562.500	140.625	250.000	421.875	82.031
17	Genset 5000W	1	7.000.000	008	8TH	25	3.937.500	984.375	1.750.000	2.953.125	82.031
18	Genset 3000W	1	2.500.000	2008	8TH	25	1.406.250	351.563	625.000	1.054.688	29.297
	Jumlah		137.916.000				54.414.474	13.603.619	35.179.000	40.810.856	1.133.635
1	BANGUNAN Bangunan Kantor	1	125.000.000	2005	20 TH	5	95.890.625	6.250.000	28.857.013	96.142.969	399.544
	Jumlah		125.000.000				95.890.625	6.250.000	28.857.013	95.890.625	399.544
	TOTAL		342.533.700				155.284.277	19.853.619	203.658.162	138.623.195	1.570.679

Sumber : Data Olahan

5.5 Penyajian Hutang Pajak di Neraca

Dari SPT (terlampir) dan laporan keuangan perusahaan (terlampir) dapat dilihat bahwa jumlah hutang pajak yang dibayar perusahaan sebesar Rp. 29.751.708,00 dan jumlah seharusnya Rp. 61.710.798,00 yang telah dibayarkan Rp. 31.959.090,00 harus disajikan dalam bagian hutang lancar.

Dibawah ini dapat dilihat bentuk laporan neraca yang disajikan pada tabel V.IV yaitu sebagai berikut :

TABEL.V.IV
PT. Putri Midai
Neraca
Periode yang berakhir 31 Desember 2010

A	AKTIVA LANCAR			C	HUTANG	
1	Kas	45.222.809			Hutang Jk.pendek	
2	BRI	64.963.764			Hutang Lainnya	
3	BNI	2.422.396			Hutang Pajak	29.751.708
4	Piutang Usaha	295.263.245				<u>31.959.090</u>
5	Piutang Lainnya	42.685.000				29.751.708
6	Dana Karyawan	57.331.186			Hutang jk.panjang	31.959.090
7	Dana payment point	<u>80.000.000</u>			Hutang Bank	
	Jumlah Aktiva Lancar		587.888.400			29.751.708
B	AKTIVA TETAP			D	Modal	
	BUKAN BANGUNAN				Modal Awal	
1	Kelompok I	79.617.700			Tahun 2010	488.750.275
		39.808.850	39.808.850		Laba Ditahan	208.261.955
	Akum.peny.kelompok I	<u>77.695.986</u>	1.921.714			185.132.397
						673.882.672
	Kelompok II	137.916.000				
		35.179.000	102.737.000			
2	Akum.peny.kelompok II	<u>97.105.144</u>	40.810.856			
	BANGUNAN					
	Bangunan Kantor	125.000.000				
3	Akum.Peny.Bangunan Kantor	28.857.031	96.142.969			
	Jumlah Aktiva Tetap		137.916.000			
			138.875.538			
	TOTAL		726.763.938		Total	726.763.938
			868.350.250			705.841.762

Sumber Data : PT. Putri Midai

5.6 Pajak Terutang

Sesuai dengan laporan SPT (terlampir) dan laporan keuangan perusahaan (terlampir) dapat dilihat bahwa jumlah hutang pajak yang dibayar perusahaan adalah sebesar Rp. 29.751.708,00 seharusnya adalah sebesar Rp. 61.710.798,00 dikurang kredit pajak dalam negeri sebesar Rp. 13.345.841,00 dan PPh pasal 25 bulanan perusahaan sebesar Rp. 2.371.410,00 sisa Rp. 45.993.547,00 dikurang pajak terutang yang dibayar sendiri oleh pihak perusahaan sebesar Rp. 14.034.457,00 maka sisa jumlah pajak kurang bayar sebesar Rp. 31.959.090,00. Maka seharusnya didalam penyajian SSP (Surat Setoran Pajak) PPh kurang bayar (Pasal 29) adalah sebesar Rp. 31.959.090,00.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Perusahaan memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan pajak yaitu diantaranya : biaya pembuatan seragam karyawan, biaya olahraga fitnes dan futsal.
2. Perhitungan jumlah penyusutan aktiva tetap belum sesuai Undang-undang perpajakan terutama pada akumulasi penyusutan kelompok I dan kelompok II.
3. Penyusutan bangunan kantor tidak menggunakan tarif yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Akibatnya mempengaruhi besarnya hutang pajak pada akhir tahun.
4. Penyajian beban pajak dalam perhitungan laba rugi perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan aturan Undang-undang perpajakan yang berlaku.
5. Terjadi kesalahan dalam penyajian perhitungan akumulasi penyusutan kelompok I dan kelompok II serta besaran hutang pajak di neraca.
6. Terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak terutang yang disajikan didalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan sehingga perusahaan mengalami pajak kurang bayar (KB).

7. Berdasarkan pembahasan dapat di ambil kesimpulan jumlah pajak yang harus dibayar menurut Undang-undang perpajakan adalah sebesar Rp.61.710.798,00.

6.2 Saran

1. Pelaporan keuangan harus dikembalikan pada konsep yang paling mendasar yakni hanya ada satu laporan keuangan untuk semua kepentingan. Karena untuk kepentingan perpajakan, maka memakai aturan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Perusahaan harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dilengkapi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang-undang perpajakan serta dilampiri daftar penyusutan aktiva tetap dan perhitungan laba rugi fiskal untuk mengetahui besarnya pajak terutang.
3. Dengan menyadari pentingnya informasi perpajakan yang ada, maka perusahaan dituntut untuk mempelajarinya. Karena setiap pelanggaran atau kealpaan perusahaan sebagai wajib pajak akan dikenakan sanksi-sanksi yang dapat merugikan perusahaan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'annul karim,surat , At-Thaubah', ayat 60

Diana, Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Andi Yogyakarta.

Hans Kartikahadi, et all, dkk. 2012. *Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*.Penerbit : Salemba Empat. Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat.

James M. Reeve, et all, dkk. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat.

Kieso, Donal E. 2002. *Akuntansi Intermediate / Edisi Kesepuluh / Jilid 2*. Penerbit : Erlangga. Jakarta.

----- keputusan Direktur Jenderal Pajak No.kep-34/PJ/2003.

Muljono, 2011. *Panduan brevet pajak penghasilan*. Penerbit CV Andi Yogyakarta.

Muljono, 2008. *ketentuan umum perpajakan*. Penerbit CV Andi Yogyakarta.

Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan :teori dan kasus*. Penerbit Salemba Empat.

Suhartono, Wirawan B Ilyas, 2007. *Pajak penghasilan, Paduan komprehensif dan praktisi*,Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.

Supramono, TheresiaWoro Damayanti, 2010. *perpajakan Indonesia*. Penerbit Andi Yogyakarta.

Soemarso S. R, 2007. *perpajakan*. penerbit Salemba Empat.

Purwono Herry, 2012. *dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak*. Penerbit Erlangga.ciracas,Jakarta 13740.

Primandita Fitriandi, Tejo Birowo, Yuda Aryanto, 2009. *komplikasi Undang-undang terlengkap*.Penerbit Salemba Empat.

----- Peraturan Menteri Keuangan No.257/PMK.03/2008

----- Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*.Penerbit Salemba Empat

Waluyo, 2010. *Akuntansi Pajak*. Penerbit Salemba Empat

Waluyo, 2009. *Akuntansi pajak*. Penerbit Salemba Empat

Wirawan B.Ilyas, Richard Burton, 2011. *Hukum pajak*. Penerbit Salemba Empat